



**Jurnal Praba Vidya**  
**ISSN: 2829-1964**  
**Volume 5 Nomor 2**

---

**Strategi Komunikasi Pendidikan Pemilih Terdaftar DPT pada Pilkada  
Buleleng di Desa Munduk Bestala**

---

**Putu Pasek Aryana**

STKIP Agama Hindu Singaraja  
[pasekaryana46@gmail.com](mailto:pasekaryana46@gmail.com)

**I Wayan Suwendra**

STKIP Agama Hindu Singaraja  
[suwendra99@gmail.com](mailto:suwendra99@gmail.com)

**I Ketut Agus Artha**

STKIP Agama Hindu Singaraja  
[agusartha001@gmail.com](mailto:agusartha001@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas strategi komunikasi dalam pendidikan untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Munduk Bestala pada perhelatan demokrasi lima tahunan yaitu Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Fokus dari penelitian ini mencakup tingkat partisipasi pemilih, strategi komunikasi yang digunakan, alasan memilih strategi, serta hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif etnografi dan studi kasus dengan teknik perekaman data dalam bentuk wawancara, kuesioner, dan dokumen. Para informan terdiri dari penyelenggara Pilkada, tokoh masyarakat dan Masyarakat yang telah memiliki hak pilih. Hasil penelitian dari paduan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih masih tergolong rendah, baik rendah secara kuantitas maupun kualitas, hal dipengaruhi oleh literasi politik yang rendah, dominasi pola komunikasi berbasis keluarga, dan kurangnya pemahaman penting tentang demokrasi. Strategi komunikasi yang digunakan sebagian besar prosedural dan sekali pakai, dan secara teknis tidak banyak menyentuh aspek nilai-nilai demokratis hanya pada kultur lokal. Potensi tokoh sebagai agen sosialisasi kurang dilibatkan dan masih mempromosikan pola komunikasi ikonik. Singkatnya, strategi yang efektif untuk strategi komunikasi dalam pendidikan pemilih harus didasarkan pada konteks untuk demokrasi dikolaborasikan dengan kultur lokal utamanya pendekatan persuasif yang etis. Inklusi aktif tokoh masyarakat dan mengadaptasi pesan dengan norma-norma sosial lokal adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi warga negara dan kesadaran politik. Strategi komunikasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan dengan etika partisipatif.

---

**Kata Kunci: Pendidikan Pemilih, Strategi Komunikasi, Pilkada**

---

## **A. Pendahuluan**

Pemilihan kepala daerah salah satu bentuk demokrasi di daerah untuk memilih gubernur, walikota/bupati, dalam sistem ketatanegaraan ada dua model pilkada yaitu Pilkada langsung dan pilkada perwakilan (Purwadi, 2019). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia, yang memberi peluang kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah. Dalam idealisme demokrasi Pancasila, Pilkada bukan semata proses elektoral, tetapi juga ruang edukatif yang membentuk warga negara sadar politik dan bertanggung jawab. Sayangnya, kenyataan di lapangan sering kali berbanding terbalik. Salah satu contohnya tampak jelas di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, tempat dilaksanakannya penelitian ini.

Secara yuridis, dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis (langsung) dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis"(Purwadi, 2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng membentuk badan ad hoc setiap 5 tahun sekali, seperti PPS yang bertugas di Desa khususnya di Desa Munduk Bestala, namun partisipasi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) cenderung stagnan atau bahkan menurun dari periode ke periode. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan pemilih yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dalam membangkitkan kesadaran politik masyarakat. Banyak warga yang memilih bukan berdasarkan pemahaman terhadap kualitas calon, tetapi karena tekanan sosial dari keluarga (klan), iming-iming bantuan sosial, atau mengikuti pemilihan sekadar menjalankan kewajiban formal sebagai warga negara.

Pemahaman warga terhadap pemilu yang sering kita temui sehari-hari masih sebatas pada hal-hal teknis, yaitu soal tahapan dan tanggal pelaksanaan pemilu dan belum menyentuh pada substansinya. Belum menyentuh pada nilai-nilai dasar dalam kehidupan berdemokrasi (Fahrurrozi dalam Budiman et al., 2020). Banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka pendidikan politik, atau tepatnya menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat. Dan pelaksanaannya tidak tergantung pada tahapan pemilu. Sosialisasi dan pendidikan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Secara umum bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Pra Pemilu, Pemilu dan Pasca Pemilu. Maka KPU tidak boleh berhenti menyelenggarakan pendidikan pemilih pada saat pelaksanaan pemilu saja. Sebelum bahkan sesudah pemilu-pun, pendidikan harus tetap berlangsung (Fahrurrozi dalam Budiman et al., 2020). Pendidikan pemilih yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh badan ad hoc seperti PPS, masih berfokus pada penyampaian informasi teknis seputar tahapan pencoblosan, alih-alih memperkenalkan nilai-nilai demokrasi substansial. Materi sosialisasi lebih dominan bersifat instruktif satu arah, ruang diskusi yang minim, atau kurangnya pelibatan tokoh masyarakat lokal secara strategis. Ini memperlihatkan adanya jarak yang nyata antara pendekatan birokratis pendidikan pemilih dan kebutuhan masyarakat akan pendekatan yang kontekstual dan kultural.

Menurut Cangara dalam penerapan strategi komunikasi, terdapat serangkaian langkah dalam menetapkan strategi tersebut, Langkah langkah dalam tahapan strategi komunikasi mencakup pemilihan dan penetapan komunikator, penentuan target sasaran beserta analisis kebutuhan khalayak, perumusan pesan, pemilihan media komunikasi, dan tahap evaluasi (Hardian & Parsono, 2024). Di sinilah letak kesenjangan antara teori dan praktik, pentingnya pemilihan komunikator yang tepat, penyusunan pesan yang sesuai dengan audiens, serta penggunaan media dan pendekatan yang relevan secara sosial budaya. Dalam kenyataannya, strategi yang digunakan di Desa Munduk Bestala belum mengakomodasi kekuatan budaya local, pola komunikasi sosial masyarakat dengan sinergitas pola yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buleleng lewat sosialisasi pendidikan untuk pemilih.

Teori norma budaya menurut Melvin DeFleur yaitu media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada norma-norma tertentu, menciptakan kesan-kesan pada khalayak dimana norma budaya umum mengenai topik dan dibentuk dengan cara tertentu. Perilaku individu biasanya dipandu oleh norma budaya mengenai suatu hal tertentu, maka media komunikasi secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku (Handhayani et al., 2020). Efektivitas pesan sangat tergantung pada norma dan nilai budaya yang diinternalisasi oleh masyarakat. Komunikasi yang tidak selaras dengan norma budaya setempat akan mengalami hambatan penerimaan pesan.

Effendi mengatakan yeknik komunikasi persuasif merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan lain sebagainya. Teknik ini berlangsung dengan personal contact yang memungkinkan komunikator mengetahui, memahami, dan menguasai; (1) *frame of reference* komunikasikan selengkapnyanya, (2) kondisi fisik dan mental komunikasikan sepenuhnya, (3) suasana lingkungan pada saat terjadinya komunikasi, dan (4) tanggapan komunikasi secara langsung (Putri & Lukmantoro, 2015). Effendi menekankan pentingnya membangun komunikasi interpersonal yang mengedepankan empati, relevansi sosial, dan partisipasi aktif dari komunikasikan.

Menurut Emile Durkheim, pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat, disebut dengan solidaritas sosial. Solidaritas sosial yang diungkapkan oleh Durkheim ini sangat berkaitan dengan yang namanya fakta sosial. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa fakta sosial itu berada di “eksternal dan “mengendalikan” setiap manusia (Mustafa Emirbrayer dalam Nugroho, 2015). Jika masyarakat memahami akan posisinya secara struktural sebagai pemilih, dan menyadari bahwa secara fungsional hak memilih disalurkan dengan baik, sehingga terbentuk sebuah solidaritas dalam satu tujuan utama membentuk keterwakilan di dalam pemerintahan, maka dalam konteks pendidikan pemilih bisa dinyatakan berhasil. Max Weber mengartikan birokrasi adalah beberapa ciri-ciri yang memiliki sifat penting yang biasanya hubungan dengan yang lainnya sering menimbulkan perbedaan. Efisiensi merupakan salah satu norma pada birokrasi (Hendrayady et al., 2022). Kedua teori tersebut membantu menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem demokrasi tergantung pada sejauh mana lembaga formal mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan struktur sosial lokal. Di Desa Munduk Bestala, struktur sosial informal seperti keluarga besar (klan) yang dikondisikan oleh tokohnya justru mengambil alih peran edukasi politik karena lemahnya penetrasi sistem formal.

Situasi ini juga relevan dijelaskan melalui teori *Operant Conditioning*, B.F. Skinner menggunakan sebutan *Operant Conditioning* untuk menjelaskan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkungan tertentu untuk mengendalikan atau mengontrol sebuah tingkah laku subjek dengan memberikan penguatan-penguatan tertentu. (Walker dalam Aprilianto & Fatikh, 2024). Operant conditioning yang dikemukakan oleh B.F. Skinner ini berfokus pada bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam operant conditioning, ada tiga komponen utama: stimulus, respons, dan konsekuensi (Aprilianto & Fatikh, 2024). Dimana perilaku memilih didorong oleh stimulus seperti iming-iming bantuan sosial yang diberikan oleh calon atau tim sukses. Akibatnya, keputusan memilih bukan lahir dari kesadaran politik rasional, melainkan pengondisian sosial yang sempit. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan pemilih sebagai subjek politik yang merdeka.

Sebagai tambahan, pendidikan pemilih semestinya tidak hanya mengandung informasi teknis, tetapi juga nilai etis dan estetis sebagaimana ditekankan dalam teori Aksiologi Pendidikan. Menurut kamus bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika (Abdulhak dalam Nuzuliah et al., 2017). Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak

politik orang lain merupakan esensi pendidikan pemilih yang belum sepenuhnya hadir dalam strategi yang dijalankan di tingkat lokal.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk menggali, mengevaluasi, dan merumuskan kembali strategi komunikasi pendidikan pemilih yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, yang tidak hanya informatif tetapi juga transformatif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan komunikasi politik yang demokratis, beretika, dan berbasis budaya lokal.

Untuk memahami lebih dalam efektivitas strategi komunikasi pendidikan pemilih terdaftar dalam DPT pada Pilkada Buleleng 2024 di Desa Munduk Bestala, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi pemilih yang terdaftar dalam DPT di Desa Munduk Bestala pada Pilkada Kabupaten Buleleng tahun 2024?
2. Apa strategi komunikasi yang digunakan dalam pendidikan pemilih terdaftar DPT yang dapat memengaruhi partisipasi di Desa Munduk Bestala?
3. Mengapa strategi komunikasi tersebut digunakan dalam pendidikan pemilih terdaftar DPT di Desa Munduk Bestala?
4. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan strategi komunikasi pendidikan pemilih terdaftar DPT di Desa Munduk Bestala?

Dengan memahami tingkat partisipasi baik secara kualitas maupun kuantitas pemilih yang terdaftar dalam DPT, strategi komunikasi yang digunakan, alasan di balik pemilihan strategi tersebut, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi di Desa Munduk Bestala pada Pilkada Kabupaten Buleleng tahun 2024, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan pendekatan komunikasi politik yang lebih efektif dan tepat sasaran pada pemilihan berikutnya. Temuan-temuan ini tidak hanya memberikan gambaran situasional secara lokal, tetapi juga dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemilih dan mendorong partisipasi demokratis secara berkelanjutan.

## **B. Metode**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (Bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2020).

### **1. Desain Penelitian**

Pendekatan kualitatif berasumsi bahwa pemahaman tingkah laku manusia (*social behavior*) tidak cukup diperoleh dari peri laku permukaan (*surface behavior*), tetapi tidak kalah pentingnya juga perlu memperhatikan perspektif dari dalam tentang peri laku manusia (*inner perspective of human behavior*) sebab dari pendekatan inilah akan diperoleh gambaran yang utuh (*holistic*) tentang manusia dan dunianya. Perbedaan pandangan tentang melihat dunia inilah yang disebut sebagai perbedaan paradigma atau seperangkat aturan untuk penelitian (*a*

*set of rule for research*)(Suwendra, 2018). Ada beberapa istilah yang diberikan terhadap penelitian kualitatif yaitu penelitian naturalistik atau alamiah, etnografi, intraksi simbolik, perspektif ke dalam, etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, humanistik, ekologis dan deskriptif (Bogdan dan Biklen dalam Suwendra, 2018). Usaha-usaha yang menguraikan dan mempelajari aspek-aspek kebudayaan disebut ‘ Etnogarfi’, aspek-aspek kebudayaan tersebut meliputi: (1). Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, (2). Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, (3). Sistem Kemasyarakatan, (4). Bahasa, (5). Kesenian, (6). Sistem Pengetahuan, dan (7). Religi (sistem kepercayaan) (Kluckhohn dalam Suwendra, 2018). Selanjutnya Surachmad (1982) menjelaskan studi kasus adalah suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci (Suwendra, 2018).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif etnografi dan studi kasus guna memahami secara mendalam praktik komunikasi yang dijalankan dalam proses pendidikan pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buleleng tahun 2024, khususnya di wilayah Desa Munduk Bestala. Desain ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana strategi komunikasi dirancang dan diimplementasikan oleh para penyelenggara pemilu dan tokoh masyarakat, serta bagaimana strategi tersebut diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap secara utuh interaksi antara struktur sosial, pesan-pesan politik, serta nilai-nilai demokrasi yang muncul dalam konteks lokal desa. Peneliti tidak hanya mengamati apa yang dilakukan para aktor komunikasi, tetapi juga memahami alasan, motivasi, serta hambatan yang mereka hadapi dalam menyampaikan informasi politik yang seharusnya mencerdaskan masyarakat.

## **2. Populasi dan Sampel**

Penelitian kualitatif penentuan informan (subyek penelitiannya) hanya ada dua cara yaitu: (1) Cara penentuan subyek penelitian berdasarkan tujuan (*purposive sampling*) dan (2) Cara penentuan subyek penelitian dengan teknik bola salju (*snow ball sampling*)(Suwendra, 2018). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berperan dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pendidikan pemilihan di Desa Munduk Bestala, baik sebagai pelaksana, fasilitator, maupun penerima informasi. Untuk memperoleh data yang relevan dan kaya makna, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan peran, pengalaman, dan kapasitas mereka dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

*Purposive sampling* merupakan sebuah metode *sampling non random sampling* dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Misalnya hendak dicoba riset tentang mutu santapan, hingga sumber informasinya merupakan orang yang pakar dalam bidang santapan. Bila melaksanakan riset tentang politik hingga yang jadi ilustrasi merupakan orang yang pakar dalam bidang politik. Ilustrasi ini lebih sesuai digunakan buat riset kualitatif ataupun penelitian- penelitian yang tidak melaksanakan generalisasi (Lenaini, 2021). Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (*sample size*). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian (Martha dan Kresno dalam Heryana, 2020).

Informan yang dipilih mencakup tiga kelompok utama:

1. Penyelenggara pemilu tingkat desa, yaitu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan sosialisasi di lapangan.
2. Tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial dalam komunitasnya.

3. Warga pemilih yang masuk dalam DPT, yang menjadi sasaran utama pendidikan pemilih dan memiliki pengalaman langsung dalam merespons strategi komunikasi tersebut.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling* yaitu menentukan siapa saja yang dinilai relevan dan memiliki wawasan terkait tema penelitian.

### 3. Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan kombinasi beberapa instrumen untuk menggali informasi dari berbagai sudut pandang dan memastikan kekayaan serta keakuratan data yang diperoleh. Instrumen yang digunakan meliputi:

1. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Perawat seringkali menganggap wawancara itu mudah karena dalam kesehariannya, perawat sering berkomunikasi dengan kliennya untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu. Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang cenderung menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan (Rachmawati, 2007). Peneliti harus memutuskan besarnya struktur dalam wawancara. Struktur wawancara dapat berada pada rentang tidak berstruktur sampai berstruktur. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi berstruktur (Holloway & Wheeler dalam Rachmawati, 2007). Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan panduan semi berstruktur, yang memungkinkan peneliti menyesuaikan pertanyaan dengan situasi dan karakteristik informan. Adapun tujuannya adalah untuk memahami persepsi, pengalaman, serta penilaian informan terhadap strategi komunikasi yang dijalankan selama proses pendidikan pemilih berlangsung. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan. Peneliti dapat menghemat waktu melalui cara ini. *Dross rate* lebih rendah daripada wawancara tidak berstruktur. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan. Contoh pertanyaan dalam pedoman wawancara: Ceritakan bagaimana nyeri anda pertama kali mulai, apakah anda pergi dan mengatakannya ke dokter pada awal-awal? Apa yang dokter bilang? Apa yang terjadi setelah itu? (Rachmawati, 2007).
2. Kuesioner penelitian adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari partisipan atau responden. Peneliti biasanya memilih kuesioner penelitian karena keuntungannya dalam mengumpulkan data dari sejumlah besar orang dengan cara yang efisien dan efektif. Kuesioner penelitian biasanya mencakup serangkaian pertanyaan terkait topik penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pandangan, opinin, dan perilaku responden. Data yang diperoleh dari kuesioner penelitian biasanya dianalisis secara statistik untuk menghasilkan informasi dan penemuan pada topik penelitian yang sedang diselidiki (Anggita Ayuningtyas, 2024). Penelitian ini menggunakan kuesioner daring melalui platform Google Form, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menjaring data tambahan secara lebih luas dari masyarakat pemilih. Kuesioner ini berisi pertanyaan tertutup dan terbuka mengenai media sosialisasi yang diterima, tokoh yang berpengaruh, serta bentuk partisipasi politik warga.
3. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Lincoln dan Guba (1985) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan/ pernyataan yang diper siapkan oleh atau untuk

individu/organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi per hitungan (*accounting*) (Suwendra, 2018). Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dokumentasi, berupa arsip kegiatan sosialisasi seperti foto, undangan, materi kampanye, laporan PPS, dan dokumen resmi tahapan Pilkada. Instrumen ini digunakan untuk mengonfirmasi data dari wawancara dan kuesioner, sekaligus memberikan bukti visual dan administratif atas pelaksanaan pendidikan pemilih.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan yaitu dengan menerapkan metode analisis interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Terdapat tiga langkah utama dalam proses ini, yaitu:

1. Reduksi data, di mana informasi yang telah terkumpul dari berbagai sumber dipilah, disederhanakan, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Proses ini melibatkan penyeleksian kutipan wawancara, hasil kuesioner, serta dokumen yang berkaitan dengan strategi komunikasi.
2. Penyajian data, yakni menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi tematik, tabel, dan kutipan langsung dari informan yang menggambarkan pola komunikasi, hambatan, serta peran tokoh masyarakat. Penyajian dilakukan secara sistematis agar memudahkan pembaca memahami keterkaitan antar variabel.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan-temuan utama berdasarkan pola yang muncul selama analisis, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang digunakan dalam kerangka konseptual. Kesimpulan bersifat reflektif, dengan memperhatikan konteks lokal dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat desa.

Teknik triangulasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data yang terkumpul dari berbagai macam teknik itu, dibandingkan, dicari persamaan dan perbedaannya, ditarik benang merahnya, dirumuskan makna yang terkandung di balik fenomena/peristiwa yang terjadi. Namun pengertian triangulasi itu, bisa mengacu kepada: informan yang berbeda-beda, tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, situasi social yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan untuk menentukan kredibilitas, validitas, dan reliabilitas data penelitian (Suwendra, 2018). Sehingga untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari wawancara, kuesioner, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi. Proses koding tematik juga digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-tema kunci seperti partisipasi pemilih, media komunikasi, bentuk pesan, dan aktor penyampai pesan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada**

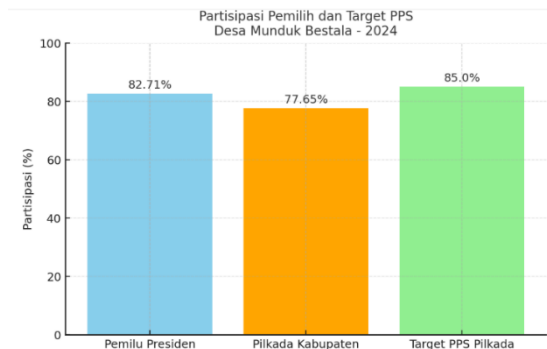
Partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Buleleng 2024 di Desa Munduk Bestala menjadi fokus utama dalam pembahasan rumusan masalah pertama. Meskipun secara administratif menunjukkan kehadiran yang relatif tinggi, partisipasi ini mengalami penurunan dibandingkan Pemilu sebelumnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih menurun dari 82,71% pada Pemilu Februari 2024 menjadi 77,65% pada Pilkada November 2024, dengan target partisipasi 85% tidak tercapai. Penurunan ini dijelaskan oleh anggota PPS:

*"Tingkat partisipasi pemilih menurun, terlihat dari antusiasme warga yang datang ke TPS yang tidak se semangat waktu pemilu, apalagi ada kendala cuaca dan akses, hasil yang didapat tidak mencapai target yang kami inginkan, karena pada pemilu februari*

2024 mencapai 83 %, dan mematok target kehadiran pada pilkada di bulan nopember 2024 yaitu 85%, namun kenyataannya menurun kehadiran hanya mencapai 77%. itu termasuk rendah yang berarti kami gagal dalam mengajak pemilih untuk menyalurkan suara"

Gambar 1. Grafik Perbandingan Data Partisipasi



Berbagai faktor penyebab partisipasi rendah diidentifikasi melalui wawancara dan kuesioner, di antaranya pekerjaan, cuaca, akses geografis, dan rendahnya minat terhadap calon. Tokoh masyarakat juga mengonfirmasi:

*“Warga datang tidak segreget dan sebanyak pemilu lalu, karena pilkada kurang bergengsi.”*

Kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar warga hadir karena merasa berkewajiban, bukan karena kesadaran politik. Seorang responden menyatakan:

*“Saya mengikuti pemilihan. Sesuai kewajiban sebagai warga negara.”*

Dari aspek sosialisasi, ditemukan bahwa kegiatan pendidikan pemilih kurang menjangkau masyarakat secara menyeluruh. PPS menyebut kegiatan sosialisasi hanya dilakukan terbatas karena kendala anggaran, sementara dokumentasi menunjukkan peserta sosialisasi sangat minim. Hal ini diperkuat oleh jawaban responden yang menyebut informasi tidak merata dan komunikasi politik tidak menyentuh secara emosional maupun substantif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masih lemah. Masyarakat hadir ke TPS, namun keterlibatan emosional, pengetahuan, dan kesadaran terhadap pentingnya hak pilih belum kuat. Hal ini mencerminkan bentuk partisipasi yang bersifat formalitas.

Jika dikaitkan dengan teori, perilaku ini sesuai dengan teori norma budaya dari Melvin DeFleur, di mana pemilih bertindak karena tekanan sosial dan kebiasaan, bukan pemikiran rasional. Sementara itu, teori birokrasi Max Weber menjelaskan bahwa pendekatan PPS yang terlalu administratif tidak cukup adaptif, dan Durkheim dalam teori struktural fungsional menyatakan bahwa fungsi sosial pendidikan politik belum berjalan dengan optimal. Selanjutnya, dalam perspektif aksiologi pendidikan, rendahnya partisipasi mencerminkan kegagalan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab politik.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Pratiwi et al. (2024) yang menekankan pentingnya komunikasi politik yang edukatif dan partisipatif. Ketidakefektifan strategi sosialisasi di Munduk Bestala menjadi penyebab lemahnya kualitas partisipasi warga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan kuesioner, partisipasi pemilih di Desa Munduk Bestala pada Pilkada Buleleng 2024 mengalami penurunan secara kuantitatif, yakni dari 82,71% pada Pemilu menjadi 77,65% pada Pilkada, tidak mencapai target 85%. Sementara itu, secara kualitas, partisipasi dinilai rendah karena didominasi motivasi kewajiban, bukan kesadaran politik yang matang. Banyak warga hadir ke TPS hanya sebagai formalitas, sementara partisipasi emosional, pemahaman terhadap calon, serta keterlibatan dalam pendidikan pemilih sangat terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa



keberhasilan demokrasi lokal tidak hanya dilihat dari jumlah kehadiran, tetapi juga dari kualitas kesadaran dan pemahaman warga dalam menggunakan hak pilihnya.

## 2. Strategi Komunikasi yang digunakan dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi

Strategi komunikasi pendidikan pemilih yang diterapkan oleh PPS Desa Munduk Bestala menunjukkan keterpaduan antara pendekatan interpersonal, komunitas, dan simbolik. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara tatap muka, berlokasi di ruang sosial yang akrab seperti balai banjar, dasa wisma, pura, dan rumah warga, serta memanfaatkan media sederhana seperti selebaran, spanduk, dan media sosial. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota PPS:

*“Kami melakukan sosialisasi pendidikan pemilih langsung ke rumah warga yang sedang berkumpul, mengundang pemilih baru di balai masyarakat, balai adat, dan rumah penduduk yang aksesnya sulit, pembagian selebaran, karena ada program dari KPU Kabupaten tentang sosialisasi pendidikan pemilih”*

Strategi ini diapresiasi oleh mayoritas responden kuesioner: 14 dari 16 responden menyatakan pendekatan ini efektif, karena informasi disampaikan secara netral, langsung, dan tanpa tekanan. Responden menilai bahwa pendekatan langsung membuat mereka merasa “dihargai karena dikunjungi langsung oleh calon atau timnya”, serta membangun hubungan emosional dan kepercayaan.

Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Kegiatan sosialisasi hanya bisa dilakukan satu kali sebulan selama lima bulan menjelang Pilkada. Dokumentasi kegiatan PPS menunjukkan bahwa pendekatan ini tetap dilaksanakan secara konsisten, meskipun skalanya terbatas.

*“Kami melakukan sosialisasi pendidikan pemilih langsung ke rumah warga..., namun dengan anggaran yang terbatas, kami tidak bisa melaksanakan lebih dari 1 kali sebulan selama menyongsong pilkada.”*

Lebih dari sekadar menyampaikan informasi, strategi ini juga memuat komunikasi simbolik, seperti dokumentasi pemberian bantuan oleh calon di Pura Kahyangan Desa di hadapan tokoh masyarakat. Praktik ini menunjukkan komunikasi yang menyentuh dimensi sosial, emosional, dan kultural, bukan hanya aspek teknis pemilu.

Tabel 1. Strategi Komunikasi Pendidikan Pemilih

Aspek	Penyelenggara Pilkada (PPS)	Tokoh Masyarakat, Tim Sukses/Pasangan Calon
<b>Pendekatan Utama</b>	Interpersonal, komunitas	Simbolik
<b>Metode Sosialisasi</b>	Tatap muka di balai banjar, rumah warga, dasa wisma, ruang kelas	Tatap muka di pura, balai masyarakat; pemberian bantuan simbolik
<b>Media Digunakan</b>	Selebaran, spanduk, pengumuman, media sosial	Kampanye langsung; komunikasi non-verbal dan simbolik
<b>Frekuensi Kegiatan</b>	1 kali sebulan (karena keterbatasan anggaran)	Tidak teratur, bergantung pada agenda dan strategi kandidat
<b>Efektivitas</b>	Dinilai efektif oleh mayoritas responden karena pendekatan langsung dan netral	Dianggap menyentuh secara emosional karena pendekatan personal dan simbolik
<b>Hambatan</b>	Dana terbatas, jangkauan belum merata	Kurangnya pemerataan kunjungan, hanya menysasar kelompok tertentu

<b>Nilai Tambah</b>	Membangun kedekatan emosional, kepercayaan, dan relasi yang bermakna	Membangun loyalitas emosional dan persepsi positif terhadap calon
<b>Kesimpulan</b>	Strategi menyentuh aspek budaya dan sosial, namun perlu diperluas dan diperkuat	Strategi efektif membangun relasi personal, namun kurang menyentuh secara merata, dan terindikasi terjadi politik transaksional

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh PPS menekankan pendekatan interpersonal dan komunitas, dinilai efektif karena bersifat netral, langsung, dan membangun kepercayaan. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan sosialisasi kurang merata dan hanya dilakukan satu kali sebulan. Sementara itu, tim sukses/pasangan calon menggunakan pendekatan simbolik dan emosional, seperti tatap muka di pura dan pemberian bantuan. Strategi ini berhasil membangun loyalitas, namun kurang menjangkau seluruh pemilih dan terindikasi adanya praktik politik transaksional. Keduanya menyentuh aspek sosial-budaya, namun perlu peningkatan frekuensi, pemerataan, dan integritas pesan agar pendidikan pemilih lebih adil dan membangun kesadaran politik yang bermakna. Dari berbagai temuan dapat diamati bahwa hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap partisipasi calon pemilih.

### 3. Latar Belakang Penggunaan Strategi Komunikasi dalam Pendidikan Pemilih

Strategi komunikasi pendidikan pemilih yang diterapkan oleh PPS Desa Munduk Bestala menggunakan pendekatan tatap muka dan komunitas karena dinilai paling sesuai dengan kondisi sosial, geografis, dan budaya masyarakat desa. Strategi ini terbukti memberikan efektivitas tinggi dalam menyampaikan informasi politik secara langsung dan personal, serta membangun kepercayaan dan kedekatan emosional antara penyelenggara pemilu dan warga.

Salah satu anggota PPS menyatakan:

*"Kami pilih cara ini karena warga lebih mudah menerima informasi secara tatap muka daripada lewat media formal"*

Pendekatan ini didukung oleh hasil kuesioner: 16 responden menyatakan menerima sosialisasi dari penyelenggara, dan 14 menilai metode tersebut paling efektif, karena masyarakat merasa dihargai dan informasi disampaikan secara netral.

Salah satu responden mengatakan:

*"Karena masyarakat merasa dihargai karena dikunjungi langsung oleh calon atau timnya."*

Menunjukkan bahwa strategi kampanye yang dilaksanakan oleh calon atau tim juga terlihat efektif sehingga dipilih oleh calon atau tim sukses, dalam pendekatan Pendidikan pemilih ini.

Di sisi lain, dokumentasi lapangan juga menunjukkan praktik komunikasi simbolik, seperti pemberian bantuan oleh pasangan calon di pura, yang memperkuat legitimasi sosial dan kepercayaan politik, terutama di hadapan tokoh masyarakat. Dalam konteks desa yang masih menjunjung nilai-nilai adat, tindakan tersebut dianggap bentuk kepedulian, bukan transaksi politik.

Strategi komunikasi pendidikan pemilih yang digunakan PPS Desa Munduk Bestala efektif secara sosial dan teoritis, karena selaras dengan budaya lokal, membangun kedekatan emosional, serta menjangkau ruang sosial yang dipercaya masyarakat. Pendekatan tatap muka dan komunitas dinilai lebih tepat dibanding metode digital, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses dan literasi. Ke depan, strategi ini perlu diperkuat melalui dukungan kelembagaan, peningkatan frekuensi, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan struktur adat untuk menjangkau pemilih secara lebih merata dan bermakna.

#### 4. Hambatan dan Tantangan Penerapan Strategi Komunikasi Pendidikan Pemilih

Pelaksanaan strategi komunikasi pendidikan pemilih oleh PPS di Desa Munduk Bestala menghadapi hambatan signifikan, terutama dari aspek anggaran, jangkauan wilayah, isi pesan, serta metode dan pendekatan komunikasi. Salah satu anggota PPS menyatakan:

*"Kami melakukan sosialisasi pendidikan pemilih langsung ke rumah warga..., namun dengan anggaran yang terbatas, kami tidak bisa melaksanakan lebih dari 1 kali sebulan selama menyongsong pilkada."*

Kondisi ini berdampak langsung pada frekuensi sosialisasi yang rendah dan jangkauan informasi yang terbatas, khususnya di wilayah terpencil. Hambatan lain yang mencuat adalah minimnya pelibatan tokoh masyarakat, padahal mereka memiliki pengaruh strategis dalam menjembatani komunikasi dengan warga.

Dari sisi substansi, konten sosialisasi dinilai terlalu teknis dan tidak disesuaikan dengan latar belakang sosial-budaya warga desa. Seorang warga menyebut:

*"Ada kendala, bahasa asing kurang mampu dicerna dan tidak tahu mekanisme pemilihan."*

Hasil kuesioner menguatkan temuan wawancara tersebut: 5 responden menyatakan warga kurang tertarik, 3 responden merasa tidak dijangkau oleh calon atau tim sukses, 2 responden menyebut tidak ada ruang tanya jawab, Lainnya menyebut sosialisasi jarang dilakukan, tidak tahu siapa penyelenggaranya, atau faktor cuaca.

Dokumentasi visual juga menunjukkan rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan di ruang formal seperti balai desa dan ruang kelas, dengan materi teknis yang disampaikan satu arah, tanpa interaksi dialogis.

Tabel 2. Hambatan dan Tantangan Strategi Komunikasi Pendidikan Pemilih

Aspek	Hambatan	Tantangan
<b>Anggaran &amp; Jadwal</b>	Dana terbatas, sosialisasi hanya sebulan sekali	Menjangkau seluruh warga dengan dana dan waktu terbatas
<b>Jangkauan Wilayah</b>	Wilayah terpencil sulit dijangkau	Menyusun strategi untuk daerah sulit akses
<b>Peran Tokoh Lokal</b>	Tokoh masyarakat tidak dilibatkan	Melibatkan tokoh adat sebagai penghubung komunikasi dengan warga
<b>Isi Pesan</b>	Bahasa teknis, tidak sesuai budaya dan pemahaman warga	Menyesuaikan konten dengan bahasa lokal dan kondisi sosial
<b>Minat Warga</b>	Kurang tertarik, komunikasi satu arah	Membuat sosialisasi yang menarik dan dialogis
<b>Metode Sosialisasi</b>	Dilakukan di tempat formal, metode monoton	Menggunakan metode kreatif dan berbasis komunitas
<b>Respon Psikologis</b>	Tidak ada ruang tanya-jawab	Meningkatkan interaksi dan penghargaan terhadap partisipasi warga
<b>Dokumentasi</b>	Kehadiran warga rendah dalam foto kegiatan	Meningkatkan partisipasi nyata, bukan hanya formalitas dokumentasi

Hambatan dalam pelaksanaan strategi komunikasi pendidikan pemilih di Desa Munduk Bestala tidak hanya teknis, tetapi juga mencerminkan kurangnya adaptasi terhadap norma budaya lokal, keterbatasan struktural, dan minimnya pendekatan partisipatif. Strategi

komunikasi belum menyentuh kebutuhan personal dan sosial masyarakat desa secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menegaskan pentingnya komunikasi yang dialogis, berbasis kultural, dan partisipatif agar pendidikan pemilih menjadi efektif di tingkat akar rumput.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian tentang strategi komunikasi pendidikan pemilih di Desa Munduk Bestala menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Sebagian besar warga datang ke TPS karena merasa berkewajiban, bukan karena kesadaran politik yang kuat. Kurangnya antusiasme dan pemahaman terhadap calon serta rendahnya keikutsertaan dalam sosialisasi menjadi indikator lemahnya kualitas partisipasi. Strategi yang digunakan oleh PPS mengandalkan pendekatan interpersonal dan komunitas, dilakukan secara tatap muka di ruang sosial seperti balai banjar, rumah warga, dan dasa wisma. Strategi ini dinilai efektif karena netral dan mampu membangun kepercayaan, namun terkendala oleh anggaran yang terbatas dan jangkauan yang belum merata. Sementara itu, pasangan calon menggunakan pendekatan simbolik dan emosional, seperti tatap muka di pura dan pemberian bantuan, yang mampu membangun loyalitas tetapi kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan cenderung bersifat transaksional.

Strategi tatap muka dan komunitas dipilih karena sesuai dengan kondisi sosial dan geografis desa, serta lebih mudah diterima masyarakat. Pendekatan ini memperkuat kedekatan emosional antara pemilih dan penyampai pesan, terutama dalam konteks masyarakat yang menjunjung nilai adat. Namun, hambatan struktural seperti keterbatasan dana, sulitnya akses wilayah terpencil, konten pesan yang belum sesuai dengan pemahaman warga, serta metode sosialisasi yang satu arah menjadi tantangan. Minimnya pelibatan tokoh masyarakat dan rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi juga memperkuat bahwa strategi komunikasi yang ada belum sepenuhnya efektif. Secara umum, strategi ini perlu diperkuat dari segi intensitas, cakupan, serta pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual, dengan dukungan kelembagaan, kolaborasi lokal, dan penyesuaian konten agar mampu membangun kesadaran politik masyarakat secara bermakna.

### **2. Saran**

Pendidikan pemilih sebaiknya tidak bersifat insidental menjelang Pilkada, melainkan menjadi program berkelanjutan yang membangun kesadaran politik masyarakat. Disarankan adanya integrasi ke dalam agenda rutin desa, seperti Hari Warga Melek Demokrasi dan pembentukan kader demokrasi lokal dari unsur pemuda, guru, dan tokoh agama.

Materi sosialisasi perlu dikemas dalam bentuk digital yang mudah diakses, serta diperluas ke pendidikan sejak dini melalui kerja sama dengan sekolah. Setelah Pilkada, harus ada forum refleksi dan evaluasi terbuka di tingkat desa. Untuk keberlanjutan, desa perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam APBDes. Dengan pendekatan ini, partisipasi politik di masa depan dapat tumbuh dari kesadaran yang kuat, bukan sekadar kewajiban.

## **Daftar Pustaka**

Anggita Ayuningtyas. (2024). *Cara membuat kuisisioner penelitian*. DosenPPKn.com.

<https://dosenppkn.com/cara-membuat-kuisisioner-penelitian/>

Aprilianto, A., & Fatikh, A. (2024). Implikasi teori operant conditioning terhadap perundangan di sekolah. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 13(1), 77–88. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v13i1.1332>

Budiman, A., Tanthowi, P. U., Asy'ari, H., Saputra, I., Manil, E. N. G., Raka Sandi, I. D. K.

- W., & Priyatna, N. (2020). *Mendaulatkan suara pemilih: Strategi sosialisasi dan potret partisipasi Pemilu 2019*.
- Handhayani, M., Arif, E., Surya Dewi, R., & Andalas Padang, U. (2020). Pergeseran budaya komunikasi di era media baru (Studi kasus penggunaan LAPOR oleh masyarakat Kota Solok). *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 11, 124–133.  
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/view/2076>
- Hardian, B. R., & Parsono, S. (2024). Strategi komunikasi humas pemerintahan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menyebarkan informasi P4GN melalui media sosial Instagram @infobnn\_ri. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 8(1), 167–180.
- Hendrayady, A., Arman, Djati, S. N., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Razak, M. R. R. (2022). *Pengantar ilmu administrasi publik*. In *Birokrasi administrasi*.
- Heryana, A. (2020). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, December, 1–14.  
<https://www.researchgate.net/publication/329351816>
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Nugroho, A. C. (2015). Teori utama sosiologi komunikasi (Fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2), 185–194.
- Nuzulah, F., Yadri, M., & Fitria, L. (2017). Aksiologi pendidikan menurut macam-macam filsafat dunia (Idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme). *Remaja Rosdakarya*, 1(2017), 1–15. <http://eprints.umsida.ac.id/573/1/aksiologi%20pendidikan.pdf>
- Purwadi, W. (2019). Pemilihan kepala daerah dalam perspektif ketatanegaraan: Pemilihan langsung versus pemilihan keterwakilan. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 82–93.  
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/4470>
- Putri, F. I., & Lukmantoro, T. (2015). Teknik-teknik persuasif dalam media sosial (Studi analisis isi kualitatif pada akun Mentor Parenting Ayah Edy di YouTube). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1–9. <https://media.neliti.com/media/publications/185258-ID-teknik-teknik-persuasif-dalam-media-sosi.pdf>
- Rachmawati, I. N. (2007). Data collection in qualitative research: Interviews. *Indonesian Journal of Nursing*, 11(1), 35–40. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Al-Idarah: *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v3i1.4839>
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan*. NilaCakra Publishing House.